

**HUBUNGAN KEBERHASILAN SASARAN STRATEGIS
DENGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

A. Waktu Tempuh Jalan Provinsi

Keberhasilan sasaran strategis dalam peningkatan kelancaran dan aksesibilitas wilayah Sumatera Selatan tercermin secara nyata melalui capaian indikator waktu tempuh jalan provinsi. Indikator ini menggambarkan efisiensi pergerakan orang, barang, dan jasa yang sangat esensial bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan berhasil mencapai realisasi waktu tempuh sebesar 2,437 jam per 100 km, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 2,5 jam per 100 km. Capaian ini menghasilkan persentase keberhasilan kinerja yang sangat baik, yakni mencapai 102,59%.

Jika disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, perolehan waktu tempuh ini menunjukkan tren perbaikan kinerja yang sangat konsisten. Penurunan waktu tempuh yang signifikan ini berkontribusi langsung pada keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis peningkatan konektivitas antarwilayah. Tren positif ini menjadi bukti konkret atas keberhasilan intervensi program preservasi dan rehabilitasi jalan yang tepat sasaran sepanjang tahun, sehingga mampu mengurai titik-titik hambatan lalu lintas secara lebih efektif dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya.

B. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi

Tingkat kemantapan jalan provinsi merupakan tolok ukur kelayakan infrastruktur fisik untuk memastikan kondisi aset jalan secara persentase berada dalam keadaan "Baik" dan "Sedang". Pada tahun 2025, realisasi tingkat kemantapan jalan tercatat sukses menyentuh angka 91,71%, sedikit melampaui target yang dicanangkan sebesar 91,5%. Melalui perolehan persentase capaian kinerja sebesar 100,23% ini, pemerintah daerah telah membuktikan komitmennya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna memfasilitasi kelancaran mobilitas masyarakat secara maksimal.

Kinerja perbaikan kondisi jalan ini menunjukkan tren peningkatan yang positif apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 yang terealisasi sebesar 90,89%. Peningkatan persentase kemantapan jalan dari tahun 2024 ke 2025 ini sangat selaras dan mendukung secara langsung pencapaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis pemerataan infrastruktur jalan di Provinsi Sumatera Selatan. Keberhasilan ini dapat terwujud berkat optimalisasi serapan anggaran pada program penyelenggaraan jalan serta penanganan yang jauh lebih responsif dalam memelihara infrastruktur, sehingga laju kerusakan jalan dapat ditekan dengan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

C. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dalam mewujudkan pembangunan tata kelola ruang daerah yang terpadu dan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang digunakan sebagai alat ukur kualitas kinerja yang mencakup siklus pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Di penghujung tahun 2025, indikator tata ruang ini mencatatkan realisasi nilai sebesar 53,14 dari target sebesar 65. Dengan demikian, persentase capaian kinerjanya berada pada angka 81,75%, yang sebagian besar dipengaruhi oleh dinamika pembangunan dan terbitnya beberapa penyesuaian regulasi baru terkait pengendalian pemanfaatan ruang.

Apabila disandingkan dengan hasil evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2025 ini secara faktual mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 yang berhasil menyentuh angka sebesar 62,50. Terjadinya penurunan nilai indeks yang cukup signifikan ini sangat dipengaruhi oleh adanya dinamika pembangunan sektoral serta terbitnya berbagai penyesuaian regulasi baru yang mengendalikan tata cara pemanfaatan ruang di daerah. Kendati mengalami tren penurunan, capaian ini tetap menjadi basis evaluasi penting dalam kerangka akuntabilitas demi perbaikan capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis penyelenggaraan penataan ruang wilayah ke depannya. Sebagai komitmen perbaikan atas hasil evaluasi ini, pemerintah daerah memfokuskan langkah taktis berupa penguatan kualitas perencanaan dan intensifikasi pengawasan agar kendala adaptasi regulasi dapat ditekan secara optimal di masa mendatang.